

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan daerah, keinginan untuk meningkatkan peran serta masyarakat daerah ditunjukkan dengan adanya keinginan pergeseran peranan pemerintah daerah dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah untuk menciptakan kemandirian daerah yang lebih besar. Otonomi daerah yang sedang bergulir saat ini sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU no.22/1994 tentang pemerintah daerah. Otonomi daerah ini telah resmi dilaksanakan pada awal tahun 2001. Salah satu konsekuensi lebih lanjut dari UU tsb adalah perlunya diatur tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Masalah perimbangan keuangan ini merupakan salah satu tuntutan reformasi, dan sebagai jawaban atas tuntutan tersebut pemerintah telah menetapkan UU no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dengan dikeluarkannya UU tentang otonomi daerah tersebut, membawa dampak positif bagi aparat pemerintah yaitu penggalian potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam atau daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, karena nantinya

diharapkan tiap-tiap daerah harus mampu membiayai daerahnya sendiri-sendiri dengan potensi yang ada. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban (*akuntabilitas*) yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab.

Instansi pemerintah dituntut untuk terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya dan mampu eksis serta unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam melakukan perubahan pemerintah perlu menyusun perencanaan strategi (*strategic planner*) yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dan sebagai langkah awal mengukur kinerja pemerintah.

Kecilnya prosentase PAD pada suatu daerah tidak disebabkan oleh miskinnya daerah tersebut tetapi lebih mengarah kepada Kebijakan Pemerintah pusat yang selalu menguasai sumber-sumber keuangan yang potensial, sehingga Pemerintah daerah tidak diberi kesempatan untuk mengelola sendiri. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang dihadapi dalam rangka Otonomi yaitu optimalnya PAD sebagai sumber keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis meneliti tentang
**”PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DALAM UPAYA
MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH ”**

B. Perumusan Masalah :

1. Bagaimana Pemerintah Kota Mataram mengoptimalkan sumber-sumber asli daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Bagaimana Kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui sistem pengukuran kinerja yang dilakukan Pemerintah.

2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Pemerintah dalam upaya melaksanakan Otonomi Daerah.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Bagi Akademis

Menambah pengetahuan mengenai sistem pengukuran kinerja Pemerintah dan pengaplikasian teori sistem pengukuran kinerja dengan praktek yang sesungguhnya.

2. Bagi Pemerintah Kota Mataram

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai *Good Governance*.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dan informasi untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram.